

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan.

Kemiskinan di Indonesia merupakan suatu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus adanya penanggulangan dan kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat miskin, dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinanpun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni :

- 1) tingkat pendapatan nasional rata-rata
- 2) lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-

ratanya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro dan Smith, 2011).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Disamping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Masalah kemiskinan yang begitu kompleks berkaitan dengan berbagai aspek yaitu, aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek yang lainnya. Kemiskinan yang ada di dalam suatu negara harus diperhatikan dengan serius karena menyangkut dengan kebutuhan orang sehari-hari.

Di Indonesia, program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo saat ini. Setiap kepemimpinan memiliki cara untuk menekan kemiskinan, walaupun hasilnya tidak selalu sama karena selain efektivitas program, jumlah penduduk juga menjadi penghalang dalam pengentasan kemiskinan.

Upaya mengatasi kemiskinan pun telah dilakukan antara lain dengan menjaga stabilitas kebutuhan pokok, program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat, Program Dana Desa, Bantuan Pangan Non Tunai dan lain-lain. Usaha-usaha ini lumayan berhasil untuk mengangkat derajat hidup rakyat Indonesia, terbukti dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Pusat nampak bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan sebesar 11,13 persen turun hingga menjadi 10,70 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 turun menjadi 10,12 persen. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan perlahan-lahan dapat terlaksanakan mengingat kemiskinan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah untuk masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin.

Akan tetapi pemerintah dalam hal ini akan berupaya terus untuk selalu menekan angka kemiskinan, karena dengan segala keterbatasan yang ada, masyarakat miskin tidak bisa memperoleh akses seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang lebih layak sehingga menurunkan kualitas dari diri seseorang yang diukur didalam Indeks pembangunan Manusia dan jumlah dari penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 IPM di Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,49% , tahun 2016 sebesar 69,98% dan tahun 2017 sebesar 70,52%.

Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan Keluarga Berencana (KB). Dari data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan bagaimana perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan secara terus menerus (BPS Jawa Tengah, 2017).

Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 33,774,141 tahun 2016 sebesar 34,019,095 dan tahun 2017 sebesar 34,257,865 . (BadanPusatStatistik :2017). Rata-rata jumlah penduduk tertinggi dari tahun 2015-2017 di Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota , brebes memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 1788754 jiwa. Sedangkan Kabupaten/kota dengan rata-rata jumlah penduduk terendah yaitu kota Magelang 121126 jiwa.

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Para peneliti kemiskinan telah memiliki konsensus pada *Copenhagen Programme of Action of the World Summit for Social Development* tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk kurangnya pendapatan dan

sumber daya produktif yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup, kelaparan, dan kekurangan gizi ,kesehatan yang buruk, keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. Peningkatan *morbidity* dan peningkatan kematian akibat penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, dan diskriminasi sosial dan pengucilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang cerdas, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terjadi penurunan tingkat kemiskinan, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan Kenaikan Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tujuan penelitian ini tercapai , maka penulis hanya membatasi pembahasan analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk dengan data dari instansi terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal kemiskinan.
- b. Sebagai referensi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kemiskinan.